

## DAFTAR PUSTAKA

Bastari Imam, 2004 *“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah Jakarta.*

Halim Abdul, 2004 *“Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta : Salemba Empat.*

InpresNomor : 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

[www.google.com](http://www.google.com)

Zirman, Edfan, Darlis, dan R.M Rozi 2010 *“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Sumiati, 2010 , *“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Kota Riau)*

Slamet Riyanto 2011 *“Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*

Urip Santoso 2010 *“ Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah*

*Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud”*

Yuli Jannaini 2013 *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*

Dra.Loina Lalolo Krina P., *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003*

Drs. H. Dadang Solihin, MA., *“Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel” Jakarta 2012*

Bambang Pamungkas April 2012 *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*

Adi Suryanto, 2008 *“Manajemen Pemerintahan Daerah (Lembaga Administrasi Daerah)”*

Bambang Pamungkas, 2010 *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*

Undang-Undang RI No 22 Republik Indonesia Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1999 *“Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*, Jakarta

Oktriandra S, 2010, *“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Dumai”*

Arifin Sabeni 1997 dan Wawan & Lia 2009 *“Tentang pengertian Pengawasan Intern”*.

Ilhyaul Ulum MD 2004 *“Peningkatan Kinerja Pemerintah”*

Leny Novianti 2003 *“Mewujudkan Pemerintahan yang baik / Good Governance”*

Whittaker 1993 dan Bastian 2001 *“Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja”*

Jones 1990 *“Salah Satu Jenis Pencegahan Fraud”*

Agus Dwiyanto 2002 *“Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”*

Ledvina 1991 *“Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah”*

Charles T Horngren dan Walter 2007 *“Pengertian Akuntansi”*

Nordiawan, ZDeddi 2006 *“Pengertian Sektor Publik”*

James A.F Stoner / Charles Wankel 1968 *“Pengertian Pengawasan”*

Mufham Al Amin 2006 *“Pengukuran dari Pengawasan”*

Isran Yani M.A.Sc 1998 *“Konsepsi Pengawasan”*

Handoko 2003 *“Indikator Pengawasan”*

Lince Bulutoding 2012 *“Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Good Governance”*

Haris Saputra 2012 *“Pengaruh Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Gametri Tirta Lestari Duri”*